



E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI 34 PROVINSI INDONESIA

Cholly Fatun Nisa¹, Arivina Ratih Yulihar Taher², Prayudha Ananta³, I Wayan Suparta⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 23 April 2025

Diterima: 28 April 2025

Terbit/Dicetak: 30 April 2025

Keywords:

Regional Development Inequality, Index Jaime Bonet, Fixed Effects Model.

Abstract

Interregional development inequality remains an important issue in national development planning, especially in developing countries like Indonesia. Imbalances in fiscal capacity, resource access, and infrastructure between provinces lead to marked differences in development levels. This study analyzes the effect of Balancing Fund (DP), Labor Force Participation Rate (TPAK), and Foreign Direct Investment (FDI) on development inequality using the Jaime Bonet Index. The data used is panel data from all provinces in Indonesia during 2014-2023, analyzed using the Fixed Effect Model (FEM) method. The results show that DP and FDI have a negative and significant effect, while TPAK is not significant. The findings emphasize the need to optimize DP and increase foreign investment to promote equitable and inclusive development.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta mengurangi ketimpangan antar daerah. Ketidakseimbangan dalam proses pembangunan dapat memicu perbedaan yang semakin mencolok antara wilayah yang telah maju dengan wilayah yang tertinggal, sehingga berdampak pada kesenjangan dalam akses terhadap berbagai aspek kehidupan. Todaro & Smith (2020) menyatakan bahwa pembangunan yang tidak merata berisiko memperbesar disparitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, pembangunan daerah bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, standar kesejahteraan, serta perluasan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan penduduk. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pendapatan dan produktivitas, tetapi juga pada penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesempatan kerja yang lebih inklusif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sumodiningrat (1999), pencapaian tujuan tersebut memerlukan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, terstruktur, dan partisipatif. Hal ini melibatkan penguatan kapasitas daerah dalam mengelola kebijakan dan sumber daya secara mandiri, pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan daya saing wilayah, serta dorongan terhadap transformasi struktural sebagai bagian dari proses modernisasi.

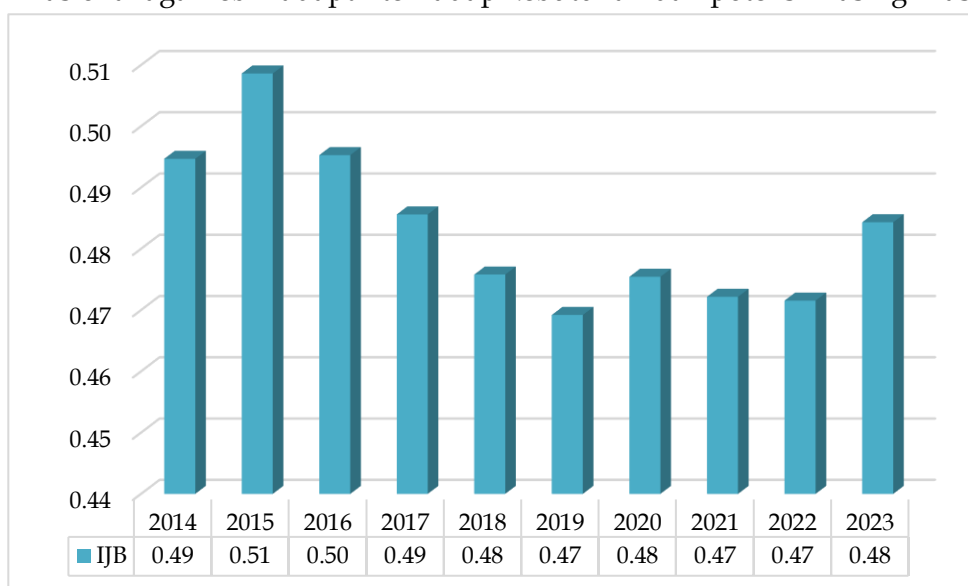
Meskipun berbagai upaya pembangunan telah digencarkan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum

* Corresponding Author.

Cholly Fatun Nisa, e-mail : chollyfatunnisa@gmail.com

sepenuhnya teratasi. Ketidakseimbangan ini muncul akibat perbedaan karakteristik wilayah, seperti variasi potensi sumber daya alam, kondisi geografis, dan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata antar daerah Anwar et al., (2023). Ketidakmerataan tersebut menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif, serta menciptakan kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai kawasan. Dalam konteks ini, peran negara menjadi krusial dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tidak selalu berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh Habibi (2024).

Ketimpangan pembangunan yang terus berlangsung dikhawatirkan dapat memperburuk polarisasi sosial-ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal. Hill (2008) menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang bersifat korektif dan berpihak pada wilayah dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah, disparitas antar daerah berpotensi semakin dalam. Hal ini menjadi semakin kompleks dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 38 provinsi yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat bervariasi. Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah barat, seperti Jawa dan Sumatra, sementara wilayah timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat Damara et al. (2024). Ketimpangan ini mencerminkan tantangan umum yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Perbedaan dalam distribusi sumber daya dan hasil pembangunan antara daerah yang telah maju dan yang masih tertinggal memperkuat urgensi untuk meninjau ulang strategi pembangunan nasional agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.



Gambar 1. Indeks Jaime Bonet di Indonesia Tahun 2014-2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2014-2023 (data diolah)

Kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia dapat tergambarkan melalui pengukuran menggunakan Indeks Jaime Bonet. Berdasarkan data periode 2014 hingga 2023, indeks tersebut menunjukkan tren penurunan secara bertahap dari angka 0,53 pada tahun 2014 hingga mencapai titik terendah sebesar 0,47 pada tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan relatif dalam distribusi pembangunan antar wilayah. Namun, setelah mencapai titik tersebut, nilai indeks stagnan pada kisaran 0,47 hingga tahun 2022, sebelum mengalami kenaikan tipis menjadi 0,48 pada tahun 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan awal dalam menurunkan ketimpangan, upaya tersebut belum cukup konsisten atau berkelanjutan. Stabilitas indeks pada level yang relatif rendah menunjukkan bahwa tantangan dalam memperkuat kualitas pembangunan dan menjamin keberlanjutannya masih cukup signifikan. Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi pada Indeks Jaime Bonet dapat menjadi indikator penting bahwa pemerataan pembangunan memerlukan pendekatan

kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan tidak hanya penurunan angka ketimpangan, tetapi juga keberlanjutan transformasi struktural di seluruh wilayah Indonesia.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia merupakan warisan dari pendekatan sentralistik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu. Studi yang dilakukan oleh (Booth, 1998) menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan, yang berdampak pada terakumulasinya pertumbuhan di wilayah tertentu dan memperlebar kesenjangan dengan daerah lainnya. Pendekatan top-down yang dominan selama periode sentralisasi menyebabkan daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas semakin tertinggal dalam hal akses terhadap layanan publik dan infrastruktur dasar. Dalam rangka mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang secara legal diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Melalui kebijakan ini, daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengurus kepentingan lokalnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen utama dalam desentralisasi fiskal, dana perimbangan berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah secara lebih merata. Dana ini merupakan mekanisme transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan utama memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, memperkenalkan reformasi dalam sistem transfer fiskal, termasuk distribusi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Melalui pendekatan ini, pemerintah pusat berupaya mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat, sekaligus memastikan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan sumber daya memperoleh prioritas dalam alokasi anggaran pembangunan Yuvanda et al., (2023).

Sejumlah studi telah menunjukkan kontribusi signifikan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah tertinggal. Penelitian Mahi dan Hasan (2021) menemukan bahwa peningkatan alokasi dana ini mampu mendorong peningkatan investasi daerah, yang berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sebaliknya, Purba dan Simandjorang (2024), mengingatkan bahwa distribusi dana perimbangan yang tidak proporsional justru dapat memperburuk ketimpangan, terutama bagi daerah dengan potensi ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan fiskal melalui dana perimbangan menjadi salah satu kunci strategis dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan antarprovinsi dan mewujudkan pembangunan nasional yang lebih inklusif.

Dinamika alokasi dana perimbangan antar provinsi selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan ketidakseimbangan yang mencolok. Data menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, memperoleh porsi dana perimbangan yang memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di luar Jawa seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, maupun Gorontalo. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan disparitas dalam jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, tetapi juga menandakan adanya kecenderungan alokasi anggaran yang berpihak pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun wilayah dibagian timur Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan ketertinggalan infrastruktur justru mengalami pertumbuhan alokasi yang stagnan atau relatif kecil. Misalnya, Nusa Tenggara Timur dan Maluku selama hampir satu dekade menunjukkan tren penerimaan dana perimbangan yang konstan, meskipun kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut masih tinggi. Di sisi lain, lonjakan signifikan yang terjadi di provinsi tertentu seperti Papua Barat pada tahun 2023 mengindikasikan adanya intervensi kebijakan atau program pembangunan berskala khusus dari pemerintah pusat. Ketidakseimbangan

dalam distribusi dana perimbangan ini menjadi salah satu cerminan nyata dari ketimpangan struktural yang terjadi dalam proses pembangunan nasional, serta menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap keadilan fiskal dalam upaya pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Selain peran dana perimbangan dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah, faktor struktural lainnya yang turut memengaruhi disparitas pembangunan daerah adalah TPAK. TPAK menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Daerah dengan TPAK yang tinggi umumnya menunjukkan dinamika ekonomi yang lebih kuat, karena keterlibatan tenaga kerja dalam berbagai sektor mampu mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata dan memperkecil kesenjangan sosial. Studi oleh Sianturi et al., (2024) menegaskan bahwa wilayah dengan TPAK yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar dalam menekan ketimpangan ekonomi. Selain itu, Ashari dan Athoillah (2023) menemukan bahwa peningkatan TPAK sering kali disertai dengan peningkatan efisiensi ekonomi, akselerasi pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, kualitas tenaga kerja yang meningkat melalui akses pendidikan dan pelatihan menjadi penting yang mendorong peningkatan TPAK Hierdawati (2022).

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan adanya ketimpangan TPAK antarwilayah yang cukup mencolok. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menunjukkan tren TPAK yang tinggi dan cenderung meningkat secara konsisten, mencerminkan stabilitas pasar tenaga kerja dan kemajuan sektor ekonomi. Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Gorontalo, masih menunjukkan angka partisipasi yang rendah serta cenderung stagnan dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan struktural, baik dari sisi akses terhadap pendidikan, keterampilan kerja, maupun peluang kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan ini memperkuat dugaan bahwa peningkatan TPAK belum terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi di daerah-daerah dengan infrastruktur ekonomi yang lebih mapan. Oleh karena itu, peningkatan TPAK secara inklusif menjadi urgensi dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Syamsuddin et al., (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja di wilayah tertinggal mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperluas basis kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, *Foreign Direct Investment* (FDI) menjadi salah satu instrumen strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata di Indonesia. Investasi asing langsung berperan penting tidak hanya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam mendukung transformasi struktural di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang Mauliarumpaka dan Zainuri (2023)). Melalui FDI, berbagai wilayah dapat memperoleh akses terhadap teknologi modern, peningkatan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, masuknya investasi asing ke daerah yang selama ini bergantung pada sektor primer seperti pertanian atau perikanan, telah mendorong diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah lebih tinggi seperti industri manufaktur dan pariwisata Hartono et al., (2024). Proses ini tidak hanya meningkatkan stabilitas ekonomi regional, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif.

Foreign Direct Investment juga menjadi sarana penting dalam mendukung agenda pemerataan pembangunan, terutama jika aliran investasi dapat diarahkan secara strategis ke provinsi-provinsi tertinggal, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerataan FDI diharapkan mampu menyeimbangkan kontribusi antarwilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan struktural yang telah lama terjadi. Studi oleh Nadzir dan Kenda (2023) menunjukkan bahwa distribusi FDI yang lebih merata berpotensi memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat.

Namun, data empiris FDI Indonesia periode 2014 hingga 2023 menunjukkan ketimpangan aliran

investasi asing yang cukup tajam antar provinsi. Provinsi Maluku Utara menjadi contoh menonjol, di mana lonjakan FDI terjadi secara signifikan berkat potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan. Keunggulan lokasi strategis di kawasan timur Indonesia turut mendorong daya saing ekspor hasil tambang dari provinsi tersebut. Sebaliknya, sebagian besar provinsi lain mencatatkan kontribusi FDI yang relatif kecil, termasuk wilayah-wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi nasional seperti Jawa dan Sumatra. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa meskipun FDI memiliki potensi besar untuk mendukung pemerataan pembangunan, tantangan dalam distribusinya tetap menjadi isu krusial yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan Regional

Pembangunan regional merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah, dengan tetap mempertimbangkan keunikan karakteristik geografis dan sosial ekonomi masing-masing daerah. Tarigan (2005) menjelaskan bahwa pembangunan regional tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Ia menyoroti bahwa perbedaan potensi sumber daya alam dan kondisi sosial ekonomi harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemanfaatan potensi lokal dianggap sebagai kunci utama agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, sekaligus sebagai instrumen untuk menurunkan disparitas antar daerah.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Myrdal et al., (1957) mengemukakan bahwa dinamika pembangunan cenderung menghasilkan ketimpangan yang semakin besar apabila tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi yang adil. Fenomena *cumulative causation* menunjukkan bahwa wilayah yang sudah lebih maju secara ekonomi memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah tertinggal, memperkuat polarisasi pembangunan. Oleh karena itu, dalam berbagai literatur pembangunan regional, ditekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mendistribusikan investasi, infrastruktur, serta akses terhadap peluang ekonomi secara lebih merata. Strategi pembangunan regional yang responsif terhadap ketimpangan akan mendukung terciptanya keadilan sosial dan integrasi nasional yang lebih solid.

2. Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Ketimpangan pembangunan wilayah merujuk pada kondisi tidak meratanya capaian pembangunan antar daerah, yang tercermin dari perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Sjafrizal (2008) menyatakan bahwa ketimpangan ini umumnya disebabkan oleh disparitas distribusi sumber daya alam, ketidaksetaraan akses terhadap infrastruktur strategis, serta kesenjangan dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja. Ketimpangan semacam ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperlebar jurang kesejahteraan antara kawasan yang telah berkembang pesat dan wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Beberapa faktor mendasar turut memperkuat disparitas ini, di antaranya variasi kandungan sumber daya alam, perbedaan struktur demografi, keterbatasan mobilitas barang dan jasa, serta ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran pembangunan antar wilayah.

Dalam konteks teori pembangunan, Douglas C. North melalui kerangka Teori Pertumbuhan Neo-Klasik memberikan pemahaman bahwa ketimpangan antar wilayah merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam tahapan awal proses pembangunan ekonomi. Perspektif ini menjelaskan bahwa pada fase awal pertumbuhan, akumulasi modal dan produktivitas cenderung terfokus di daerah tertentu yang lebih siap secara struktural, sehingga memperbesar ketimpangan spasial. Namun, teori ini juga menggarisbawahi bahwa dalam jangka panjang, melalui penyebaran teknologi dan peningkatan

konektivitas antar wilayah, kesenjangan tersebut akan berkurang secara bertahap menuju kondisi yang lebih seimbang Sjafrizal (2008). Dengan demikian, ketimpangan pembangunan bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk merancang kebijakan yang mampu mempercepat konvergensi pertumbuhan antar daerah.

Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ketika sumber daya dan investasi hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, potensi dari daerah-daerah belum dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, di mana daerah yang tertinggal tidak dapat berkontribusi secara maksimal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Menurut Todaro dan Smith (2011), ketimpangan pembangunan antar daerah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan memperbesar disparitas kesejahteraan antar wilayah.

3. Indeks Jaime Bonet

Indeks Jaime Bonet merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah dengan mempertimbangkan perbedaan pendapatan per kapita relatif. Indeks ini dikembangkan oleh Jaime Bonet untuk mengidentifikasi disparitas ekonomi antar daerah dan memahami dinamika ketimpangan regional Bonet (2006). Dengan menggunakan indeks tersebut, dapat menggambarkan ketimpangan antar daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{it} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right|$$

Dalam indeks ini, I_{it} merepresentasikan ketimpangan pembangunan di daerah i pada tahun t , $PCGDP_{i,t}$ adalah PDRB per kapita daerah i pada tahun t , dan $PCGDP_{NAL,t}$ adalah PDRB per kapita nasional pada tahun yang sama. Nilai indeks ini berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar di daerah tersebut.

4. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah serta menekan tingkat ketimpangan antar wilayah. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam mendukung keuangan daerah. DAU bertujuan untuk menyetarakan kapasitas keuangan antar daerah, sedangkan DAK difokuskan pada pembiayaan program-program tertentu yang dianggap prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Alokasi dana ini didasarkan pada berbagai kriteria, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan potensi fiskal daerah. Tujuan utama dari penyaluran dana perimbangan adalah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memadai, mengurangi ketimpangan antar daerah, dan mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal. Dengan demikian, mekanisme ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Implementasi desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan telah meningkatkan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang pada gilirannya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal daerah, yang dapat menghambat efektivitas desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, meskipun dana perimbangan berperan penting dalam mendukung desentralisasi fiskal, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap diperlukan guna mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator utama yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Menurut Badan Pusat Statistik 2021, TPAK dihitung sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Indikator ini mencerminkan kapasitas suatu negara atau daerah dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kondisi ekonomi, dan kebijakan pasar tenaga kerja.

TPAK berperan penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Daerah dengan TPAK tinggi biasanya memiliki tingkat produktivitas yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2011), peningkatan partisipasi angkatan kerja, terutama dari kelompok muda dan perempuan, dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dengan memperluas basis tenaga kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Namun, pengaruh TPAK terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah dapat bervariasi. Penelitian oleh Nilasari dan Amelia (2022) menunjukkan bahwa peningkatan TPAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, studi oleh Wibowo dan Pangestuty (2023) menemukan bahwa TPAK memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa peningkatan TPAK justru berpotensi memperbesar ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap ketimpangan pembangunan dapat bervariasi tergantung pada konteks regional dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika ekonomi daerah.

6. Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment (FDI) memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam undang-undang tersebut, penanaman modal asing dijelaskan sebagai aktivitas investasi yang dilakukan oleh pihak asing untuk menjalankan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik melalui kepemilikan modal secara penuh maupun melalui kerja sama dengan investor dari dalam negeri.

Dalam konteks pembangunan daerah, FDI tidak hanya berkontribusi pada peningkatan investasi, tetapi juga mendukung distribusi modal dan inovasi teknologi yang lebih merata. Konsep efek penyebaran (*spread effect*) dalam teori ekonomi regional menjelaskan bagaimana FDI dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dengan menyebarkan manfaat ekonomi dari wilayah yang lebih maju ke daerah tertinggal. Efek ini terjadi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di wilayah penerima investasi. Namun, penelitian oleh Syamsir dan Rahman (2018) menunjukkan bahwa ketimpangan tetap dapat terjadi jika investasi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu tanpa adanya kebijakan pemerataan yang efektif.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berbentuk panel, yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2014 hingga 2023. Data diperoleh dari BPS, dan DJPK. Variabel dependen yang dianalisis adalah ketimpangan pembangunan daerah, sementara variabel independennya meliputi dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan *foreign direct investment*. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel. Menurut Widarjono (2019), dalam pendekatannya model data panel terdiri dari model CEM, FEM, dan REM.

Dalam penelitian ini, masing-masing variabel dianalisis berdasarkan satuan yang sesuai. Dana Perimbangan (DP) diukur dalam juta rupiah, menggambarkan jumlah transfer fiskal dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan proporsi usia kerja yang terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai tenaga kerja yang sudah bekerja maupun yang sedang dalam proses pencarian pekerjaan. *Foreign Direct Investment* (FDI) diukur dalam persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan kontribusi investasi asing terhadap aktivitas ekonomi di suatu daerah. Sementara itu, ketimpangan pembangunan daerah diukur menggunakan Indeks Jaime Bonet, yang mengkuantifikasi tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam cakupan nasional.

Untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah Indeks Jaime Bonet. Adapun rumus dari Indeks Jaime Bonet adalah sebagai berikut (Bonet, 2006).

$$I_{it} = \left| \frac{PCGDP_{i,t}}{PCGDP_{NAL,t}} - 1 \right|$$

Keterangan:

I_i = Ketimpangan pembangunan daerah
 t = Tahun
 $PCGDP_{i,t}$ = PDRB perkapita provinsi
 $PCGDP_{NAL,t}$ = PDRB perkapita nasional

Penelitian ini menerapkan model regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan (DP), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan *foreign direct investment* (FDI) terhadap ketimpangan pembangunan daerah yang diukur dengan Indeks Jaime Bonet (IJB). Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IJB_{it} = \beta_0 + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 FDI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

IJB = Ketimpangan Pembangunan Daerah
 DP = Dana Perimbangan
 TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 FDI = *Foreign Direct Investment*
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen
 ε = Error term
 i = Provinsi
 t = Tahun

Penelitian ini memanfaatkan data panel, yang merupakan kombinasi antara data lintas individu (*cross-section*) dan data runtun waktu (*time series*), guna menganalisis dinamika variabel antar entitas dan periode. Dalam proses estimasi model, dilakukan serangkaian pengujian untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai Menurut Widarjono (2019). Uji Chow digunakan untuk membandingkan model efek tetap (Fixed Effect Model/FEM) dengan model efek umum (Common Effect Model/CEM). Selanjutnya, Uji Hausman diterapkan untuk memilih antara FEM dan model efek acak (Random Effect Model/REM). Apabila diperlukan, Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengevaluasi kelayakan REM dibandingkan dengan CEM

Uji Asumsi Klasik untuk menentukan model regresi mencukupi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil estimasi valid dan reliabel. Uji normalitas digunakan sebagai penentuan bahwa model terdistribusi secara normal. Uji normalitas menjadi dasar dalam pengujian hipotesis dan validitas dari uji t dan uji F. Untuk melakukan uji normalitas, digunakan J-B test Uji Jarque-Bera memiliki kriteria hipotesis dalam pengujiannya, H_0 : Jarque Bera stat > 0,05 menjadi batas pengambilan keputusan dalam uji normalitas residual H_a : Jarque Bera stat < 0,05 residual terdistribusi secara tidak normal. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi linier yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai korelasi

antar variabel independen; nilai korelasi di bawah 0,85 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas signifikan. Uji heteroskedastisitas diterapkan untuk mendeteksi ketidaksamaan varians residual antar observasi, menggunakan metode seperti uji Breusch-Pagan

Uji hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi parameter model Gujarati dan Porter (2013) Uji t digunakan untuk menilai dampak setiap variabel independen terhadap variabel dependen, sementara uji F mengevaluasi signifikansi simultan dari seluruh variabel independen dalam model. Koefisien determinasi (R^2) diperlukan untuk mengukur proporsi variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model; nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa tersebut efektif dalam menjelaskan variabilitas yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil pemilihan model terbaik, dan pengujian asumsi klasik

Pemilihan Model Terbaik				
Pengujian	Statistik Hitung	Probability	Keputusan	Kesimpulan
Uji Chow	1447,471802	0,0000	Tolak H0	Terpilih FEM
Uji Hausman	9,157649	0,0273	Tolak H0	Terpilih FEM
Pengujian Asumsi Klasik				
Pengujian	Statistik Hitung	Probability	Keputusan	Kesimpulan
Uji Normalitas	4,220405	0,121213	Terima H0	Memenuhi
Uji Multikolinearitas				
DP	0,373402	-	<0,85	Memenuhi
TPAK	-0,273845	-	<0,85	Memenuhi
FDI	-0,047275	-	<0,85	Memenuhi
Uji Heteroskedastisitas				
Pengujian	Statistik Hitung	Chi-square Tabel	Keputusan	Kesimpulan
Sum squared resid	0,025235	7,814728	Terima H0	Memenuhi

Sumber: data diolah

Menurut hasil uji yang ditampilkan pada Tabel 1, proses pemilihan model regresi data panel dalam penelitian ini diterapkan melalui tahapan uji statistik yang sistematis guna menentukan model yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Langkah awal dari proses tersebut adalah pelaksanaan Uji Chow, yang berfungsi untuk membandingkan dua pendekatan dasar dalam regresi panel, yakni CEM dan FEM. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan signifikan dalam intercept antar unit observasi, yang tidak dapat ditangkap oleh CEM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, yang memperlihatkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa CEM merupakan model yang paling tepat. Dengan ditolaknya hipotesis tersebut, maka FEM dianggap lebih layak digunakan karena mampu mengakomodasi variasi individual yang bersifat tetap dalam data panel, khususnya perbedaan intercept antar provinsi.

Langkah selanjutnya dalam analisis adalah melakukan Uji Hausman yang bertujuan untuk menentukan model paling tepat antara FEM dan REM dalam konteks regresi data panel. Uji ini secara khusus dirancang untuk mengevaluasi konsistensi serta efisiensi estimator yang dihasilkan oleh masing-masing model. Dalam pengujian ini, diperoleh nilai probabilitas yang berada di bawah ambang batas signifikansi 5%, yang menandakan adanya perbedaan signifikan antara kedua model tersebut. Konsistensi ini penting untuk menentukan bahwa hasil estimasi tidak bias dan dapat diandalkan dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji tersebut, model Fixed Effect dipilih sebagai pendekatan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan pada penelitian ini, karena mampu menangkap efek individual yang bersifat tetap pada masing-masing unit observasi

Setelah penentuan model, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas model regresi. Pengujian meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik, seperti normalitas, maka dilakukan penyesuaian dengan menggunakan metode estimasi *Generalized Least Squares* (GLS) atau pembobotan (*cross-section weight*). Metode ini bertujuan untuk mengatasi masalah normalitas dan meningkatkan efisiensi estimasi model.

Tabel 2 Hasil estimasi FEM

Variabel Bebas	Koefisien	Std.Error	t-Statistik	Prob
C (intersp)	0,0565219	0,042114	13,42131	0,0000
DP	-1,93E-09	4,60E-10	-4,195039	0,0000
TPAK	-0,000932	0,000629	-1,480549	0,1398
FDI	-0,001143	0,00026	-4,402035	0,0000
Ringkasan Statistik				
R-squared	0,994328	F-statistik		1475,514
Adjusted R-squared	0,993654	Prob(F-statistik)		0,000000

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil estimasi, persamaan FEM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IJB = 0,565219 - 1,930959DP - 0,000932TPAK - 0,001143FDI$$

*) Signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen

Hasil estimasi memperlihatkan bahwa variabel DP mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Koefisien regresi sebesar -1,93E-09 mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi DP berkontribusi pada penurunan tingkat ketimpangan pembangunan. Temuan dari Purba dan Simandjorang (2024) mendukung hal ini, yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki peran signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur, pelayanan publik, serta mendorong pengembangan ekonomi lokal, yang pada akhirnya membantu mengurangi disparitas antarwilayah. Secara keseluruhan, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa DP digunakan secara efektif untuk memperbaiki akses terhadap infrastruktur, layanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal, yang pada akhirnya mempersempit kesenjangan antar daerah. Distribusi dana perimbangan yang ditujukan untuk mendukung pemerataan pembangunan di daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah telah berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Berdasarkan hasil estimasi, variabel TPAK menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,000932, namun pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi dalam TPAK, baik peningkatan maupun penurunan, tidak secara langsung memengaruhi distribusi pembangunan antarwilayah. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah ketidakseimbangan dalam kualitas tenaga kerja, di mana kenaikan jumlah tenaga kerja tidak disertai dengan bertambahnya keterampilan dan pendidikan yang memadai. Akibatnya, kontribusi tenaga kerja terhadap pembangunan tidak merata di seluruh daerah. Studi yang dilakukan oleh Pamiati dan Woyanti (2021) memperlihatkan bahwa TPAK memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Meskipun koefisien regresi mengarah pada penurunan ketimpangan seiring dengan meningkatnya TPAK, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini disebabkan oleh distribusi kesempatan kerja yang masih belum merata di berbagai wilayah. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan sebaiknya mencakup program pelatihan tenaga kerja, pemberian insentif bagi industri di daerah tertinggal, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di seluruh wilayah.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa variabel FDI mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Koefisien regresi sebesar -0,001143 mengindikasikan bahwa peningkatan aliran FDI ke suatu wilayah berkontribusi pada penurunan disparitas pembangunan regional. Hal ini mencerminkan peran FDI dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Teori *spread effect* menjelaskan bahwa FDI dapat memberikan efek penyebaran yang positif, di mana pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih maju akibat investasi asing dapat berdampak pada wilayah sekitarnya melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan integrasi pasar. Dengan demikian, FDI tidak hanya memperkuat basis ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azim et al., (2022), yang menunjukkan bahwa FDI berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif, diperlukan kebijakan yang mendorong distribusi FDI secara merata ke berbagai daerah, terutama yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan insentif investasi di daerah tertinggal dapat memperkuat daya tarik wilayah tersebut bagi investor asing, sehingga mempercepat proses pemerataan pembangunan nasional.

Nilai adjusted R^2 yang diperoleh sebesar 0,994328 menunjukkan bahwa 99,4328 persen variasi dalam ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia, yang diukur menggunakan Indeks Jaime Bonet, dapat dijelaskan oleh variabel dana perimbangan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan *foreign direct investment*. Sementara itu, sisanya sebesar 0,57 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang digunakan. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia pada tingkat signifikansi 5 persen. Secara individual, masing-masing variabel dalam model juga terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga variabel dana perimbangan (DP), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan *foreign direct investment* (FDI) diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai elemen yang berkontribusi atau memengaruhi ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia. DP menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana yang lebih besar kepada daerah dapat mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, mencerminkan efektivitas mekanisme transfer fiskal dalam mendukung pemerataan ekonomi. Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah negatif, peningkatan atau penurunan TPAK tidak secara langsung memengaruhi distribusi pembangunan antar daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak merata, di mana peningkatan partisipasi angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan yang memadai. Sementara itu, FDI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Semakin tinggi aliran investasi asing langsung ke suatu daerah, ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung menurun. FDI berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas lokal, yang pada akhirnya membantu pemerataan pembangunan.

Untuk memperkuat peran dana perimbangan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan, diperlukan perbaikan dalam formula alokasi yang lebih transparan dan adil, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaannya agar benar-benar mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks tingkat partisipasi angkatan kerja, pemerintah perlu fokus pada peningkatan mutu tenaga kerja dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program pelatihan, pendidikan, serta pengembangan keahlian yang selaras

dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja, sehingga partisipasi angkatan kerja dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemerataan pembangunan. Terkait *foreign direct investment*, kebijakan yang mendorong distribusi FDI secara merata ke berbagai daerah perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah-daerah tertinggal, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan, sehingga FDI dapat berperan lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313–326. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.08>
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23>
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. *Annals of Regional Science*, 40(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>
- Booth, A. (1998). The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: a history of missed opportunities. In *Choice Reviews Online* (Vol. 36, Issue 01). <https://doi.org/10.5860/choice.36-0439>
- BPS. (2021). *Survei angkatan kerja nasional 2021* (D. S. K. dan Ketenagakerjaan (ed.); Vol. 1). Badan Pusat Statistik.
- Damara, R. D., Intan, U. I. N. R., Lampung, B., Jalan, A., Kolonel, L., Endro, H. J., Sukarame, K., & Bandar, K. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan pada 34 Provinsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Tahun Periode 2019-2023) tantangan yang perlu diatasi . Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa aspe. 4(3).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics. In N. Fax & A. E. Hilbert (Eds.), *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (5th ed.). Douglas Rainer.
- Habibi, M. (2024). Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 59–63. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1412>
- Hartono, P. G., Firman, A., & Endra, I. M. (2024). The Influence of Gross Regional Domestic Product Per Capita and Foreign Direct Investment on Income Inequality : An Empirical Study of 34 Provinces in Indonesia. 8(2). <https://doi.org/10.18196/jerss.v8i2.23256>
- Hierdawati, T. (2022). Pengaruh TPAK, Kesehatan dan Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8), 958–966.
- Hill, H. (2008). Globalization, inequality, and local-level dynamics: Indonesia and the Philippines. *Asian Economic Policy Review*, 3(1), 42–61. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2008.00087.x>
- Mahi, & Hasan. (2021). Pengaruh Perbaikan Intergritas Terhadap Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 57–68.
- Mauliarumpaka, K., & Zainuri, Z. (2023). The Influence of Foreign Investment and Domestic Investment on Inequality in Economic Development between Regions in Java Island in 2012-2021. *Proceeding International Conference on Economics, Business and Information Technology (Icebit)*, 4(12), 162–168. <https://doi.org/10.31967/prmandala.v4i0.744>
- Myrdal, G., Duckworth, G., & Londres, C. (1957). "economic theory and under-developed regions." 115–116.
- Nadzir, M., & Kenda, A. S. (2023). Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri : Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 14(1), 317–328.
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB Per Kapita , Indeks Pembangunan Manusia , dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Perkembangan Rasio Gini Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 2(2), 171–182.
- Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). 218-429-1-Pb. *Business Economic Entrepreneurship*, 4(1), 18–28.
- Purba, S. F., & Simandjorang, B. M. T. V. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Indonesian*

- Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 141–155.
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M. D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 739–750. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2606>
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Prespektif Teori dan Implementasi). In *Journal of Regional and City Planning Institut Teknologi Bandung* (Vol. 10, Issue 3, pp. 146–159).
- Syamsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.24252/ecc.v5i1.5235>
- Syamsuddin, N., Nelly, Rahmi, & Saputra, D. H. (2021). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Sosiohumaniora Kodepena Information Center for Indonesian Social Sciences*, 2(1), 150–165.
- Tarigan, M. R. . R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (A. Maulana & N. I. Sallama (eds.); 11th ed.). Penerbit Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 1.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Wibowo, K. P., & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 2(3), 539–549.
- Widarjono, A. (2019). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. In *Yogyakarta : UPP STIM YKPN* (Edisi 5). UPP STIM YKPN. <http://repository.ut.ac.id/3891/1/EKSI4417-M1.pdf>
- Yuvanda, S., Rasjid, M. R., & Herlin, F. (2023). Dampak Dana Perimbangan Terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 11(2), 90–96. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.310>